

Rerangka Konseptual Akuntansi Hijau*

Oleh: Andreas Lako*

*Guru Besar Akuntansi Hijau, Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan Unika Soegijapranata, Semarang; Pengurus IAI-KAPd Seksi *Corporate Governance & CSR*

I. Pengantar

Dalam artikel “Urgensi Standar Akuntansi Hijau” (*Majalah AKUNTAN* edisi Januari-Maret 2018, hlm 68-72), saya telah membahas tentang salah kaprah perlakuan akuntansi konvensional terhadap biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social and environmental responsibility* atau *CSER costs*) dan biaya bisnis hijau (*green business costs*), serta urgensi penerapan Standar Akuntansi Hijau untuk menghijaukan praktik akuntansi dan pelaporan informasi akuntansi entitas korporasi. Penghijauan (*greening*) terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan praktik akuntansi entitas sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena selain untuk menepis tuduhan dari berbagai pihak bahwa akuntansi dan para akuntan telah menghasilkan informasi akuntansi yang tidak akurat dan menyesatkan serta menjadi sumber pemicu-pemacu krisis sosial dan lingkungan, juga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya gerakan *green business* dan *green economy* dalam upaya mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan mengatasi krisis sosial dan lingkungan.

Melanjutkan tulisan sebelumnya, dalam tulisan ini saya akan mengkonstruksi Rerangka Konseptual Akuntansi Hijau atau RKAH (*Conceptual Framework of Green Accounting*). Konstruksi tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah, IAI (khususnya Dewan Standar Akuntansi Keuangan), entitas korporasi dan lainnya dalam penyusunan Standar Akuntansi Hijau dan penerapan praktik Akuntansi Hijau. Konstruksi RKAH meliputi hakikat Akuntansi Hijau, Rerangka Konseptual Akuntansi Hijau, Prinsip-Prinsip Akuntansi Hijau dan model Laporan Akuntansi Hijau.

2. Hakikat Akuntansi Hijau

Seiring dengan kian seriusnya krisis sosial dan lingkungan, dalam dua dekade terakhir Akuntansi Hijau (*Green Accounting*) mulai mendapat perhatian besar dari para

* Artikel ini merupakan pengembangan dari artikel yang dimuat di majalah *AKUNTAN INDONESIA*, edisi April-Juni 2018, hlm 60-66

akademisi, praktisi dan periset akuntansi. Akuntansi Hijau mulai dikembangkan secara serius dalam upaya meminimalisir kritik keras terhadap kelemahan akuntansi konservatif yang dinilai cenderung mengabaikan obyek, fenomena atau peristiwa-peristiwa lingkungan dan sosial yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan entitas korporasi dalam proses akuntansi.

Pengabaian tersebut telah menyebabkan informasi akuntansi yang dihasilkan dalam proses akuntansi dan disajikan via laporan keuangan (*financial statements*) kepada para pihak untuk penilaian dan pengambilan keputusan dinilai lebih bersifat keuangan, parsial, tidak lengkap dan akurat, kurang relevan dan reliabel, serta menyesatkan. Informasi akuntansi berbasis akuntansi keuangan konservatif juga dituding turut menjadi pemicu dan pemacu krisis lingkungan dan krisis sosial yang kian serius dalam beberapa dekade terakhir (Maunders dan Burrits, 1991; Gallhofer dan Haslam, 1997; Gray dan Bebbington, 2001; Greenham, 2010; Lako, 2015). Karena itu, pengembangan rerangka konseptual (*conceptual framework*) Akuntansi Hijau untuk mendasari perubahan dan transformasi praktik akuntansi konservatif menuju praktik akuntansi yang ramah lingkungan (*green*) menjadi sangat penting dan mendesak.

Namun, hasil telaah literatur yang saya lakukan menunjukkan bahwa perspektif para periset akuntansi tentang hakikat Akuntansi Hijau masih beragam dan kabur. Ada yang menyatakan bahwa Akuntansi Hijau merupakan bagian dari Akuntansi Sosial (*Social Accounting*) atau nama lain dari Akuntansi Lingkungan (*Environment Accounting*) atau Akuntansi Sosial dan Lingkungan (Gray & Laughlin, 2012). Ada yang menyatakan bahwa Akuntansi Hijau merupakan suatu spirit agar praktik akuntansi lebih ramah lingkungan.

Secara umum, mayoritas periset akuntansi menyatakan bahwa Akuntansi Hijau pada hakikatnya sama dengan *Sustainability Accounting* (Akuntansi Keberlanjutan) yang mulai dikembangkan sejak pertengahan era tahun 1990an. *Sustainability Accounting* mengintegrasikan akuntansi keuangan, akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan secara terpadu dalam proses akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang lengkap, relevan dan reliabel serta bermanfaat bagi para pihak dalam pengambilan keputusan dan penilaian terhadap keberlanjutan suatu entitas korporasi (Schaltegger, Bennett dan Burritt, 2006; Lamberton, 2005; Bebbington, Unerman dan O'dwyer, 2014; Lako, 2011, 2013).

Namun, hasil telaah saya terhadap berbagai literatur akuntansi dan bisnis menunjukkan bahwa Akuntansi Hijau sesungguhnya merupakan cabang ilmu baru dalam Akuntansi yang independen. Makna dan hakikatnya sesungguhnya juga jauh lebih luas dibanding Akuntansi Sosial, Akuntansi Lingkungan, Akuntansi Sosial dan Lingkungan, dan bahkan Akuntansi Berkelanjutan (Lako, 2018). Akuntansi Hijau lebih dilandasi oleh nilai-nilai spiritualitas. Obyeknya mencakup semua fenomena, obyek, realitas, tindakan

atau transaksi-transaksi yang melekat atau terjadi pada lingkungan semesta alam dan manusia. Karena perilaku manusia (masyarakat) dan korporasi memiliki relasi kausalitas (timbal-balik) dengan lingkungan semesta alam, maka akuntansi sosial, akuntansi keuangan/ekonomi dan akuntansi lingkungan menjadi bagian dari Akuntansi Hijau. Akuntansi untuk tanah, lahan, tumbuh-tumbuhan, hutan, air, udara, atmosfer, laut, karbon, limbah, tanggung jawab sosial dan lingkungan entitas korporasi (CSR), dan lainnya juga merupakan bagian dari Akuntansi Hijau (Lako, 2016; 2018).

Secara khusus, sesuai dengan makna dari kata “*green*” yang berarti hijau atau penuh dengan tanaman hijau yang menyejukkan, maka hakikat Akuntansi Hijau sesungguhnya adalah akuntansi yang mengasahi, menghijaukan, menyejukkan dan melestarikan bisnis dan laba (*profit*) korporasi karena memperhitungkan semua aspek lingkungan (*planet-nature*) dan masyarakat (*people-human*) dalam proses akuntansi. Karena itu, Akuntansi Hijau harus dikonstruksi, dipraktikkan dan didedikasikan tidak hanya untuk kepentingan korporasi dan para pemangku kepentingannya (*stakeholder*), tapi juga untuk kepentingan kelestarian lingkungan semesta alam dan kesejahteraan masyarakat luas (Lako, 2018).

Selain itu, dari perspektif religiusitas dan spiritualitas, Akuntansi Hijau juga bermakna sebagai akuntansi yang mengasahi dan menyejukkan lingkungan-semesta alam dan sesama manusia atau disebut sebagai Akuntansi Kasih. Dalam perspektif Akuntansi Kasih (*Spiritual Accounting*), proses akuntansi tidak hanya berfokus pada obyek-obyek, peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi keuangan atau bersifat keuangan, tapi juga berfokus pada obyek-obyek, peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi dan dampak-dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas operasi suatu entitas korporasi (*externalities costs*). Akuntansi Kasih berupaya mengasahi bisnis-ekonomi, masyarakat dan lingkungan alam secara terpadu, tulus dan berkelanjutan.

Prinsip Akuntansi Kasih tersebut telah mendasari pertimbangan sejumlah pelaku bisnis dan akuntan dalam pengembangan konsep dan praktik *sustainability business* dan *sustainability accounting*. Yaitu, apabila suatu korporasi menginginkan bisnis dan labanya tumbuh secara berkelanjutan maka korporasi tersebut harus peduli, adil dan mengasahi lingkungan dan masyarakat secara tulus dan berkelanjutan. Demikian pula apabila profesi akuntansi ingin akuntansi dan profesi akuntansi bisa semakin tumbuh-kembang dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan maka akuntansi harus kian responsif dan peduli pada isu-isu lingkungan dan sosial dalam proses akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas, Akuntansi Hijau pada hakikatnya merupakan paradigma baru akuntansi yang menekankan bahwa fokus dari proses akuntansi (pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, penyajian dan pelaporan, serta pengungkapan informasi) tidak hanya pada obyek-obyek, transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa keuangan atau yang bersifat keuangan, tapi juga pada obyek-obyek,

transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Proses akuntansi terhadap tiga obyek tersebut harus terintegrasi secara sistematis sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan dan disajikan kepada para pemangku kepentingan merupakan informasi yang lengkap, utuh, akurat dan relevan, serta bermanfaat (Lako, 2016; 2018)

3. Rerangka Konseptual Akuntansi Hijau

Kerangka konseptual Akuntansi Hijau pada hakikatnya merupakan seperangkat konsep, teori atau sistem akuntansi yang fundamental dan saling berelasi satu sama lain yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyusun standar dalam penyusunan standar akuntansi dan sebagai acuan dalam pemecahan masalah praktik-praktik akuntansi. Kerangka konseptual tersebut juga berperan sebagai basis pertimbangan dalam penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan-pengungkapan informasi akuntansi serta pendidikan akuntansi.

Secara umum, dari perspektif entitas korporasi, ada tiga level rerangka konseptual Akuntansi Hijau. **Level pertama** adalah level teoritis, yaitu berisi definisi, ruang lingkup dan tujuan dari Akuntansi Hijau dan Pelaporan Informasi Akuntansi Hijau. **Level kedua** merupakan level konseptual fundamental, yaitu mengidentifikasi dan menguraikan karakteristik kualitatif dari informasi Akuntansi Hijau dan elemen-elemen dasar dari Laporan Akuntansi Hijau. **Level ketiga** adalah level operasional, yaitu berisi rerangka konseptual yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengakuan (*recognition*) dan pengukuran nilai (*measurement*) dari elemen-elemen mendasar laporan Akuntansi Hijau dan tipe informasi yang disajikan dalam pelaporan Akuntansi Hijau. Berikut uraian ringkasnya.

(1) Definisi, tujuan dan sasaran Akuntansi Hijau

Akuntansi Hijau adalah proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan dan pengungkapan informasi terhadap obyek-obyek, transaksi-transaksi, peristiwa-peristiwa atau dampak-dampak dari aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan serta korporasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.

Berdasarkan definisi tersebut, tujuan dari Akuntansi Hijau dan Pelaporan Informasi Akuntansi Hijau adalah untuk menyajikan informasi akuntansi keuangan (ekonomi), informasi akuntansi sosial dan informasi akuntansi lingkungan secara terpadu dalam satu paket pelaporan akuntansi agar dapat digunakan para pihak yang berkepentingan dalam penilaian dan pengambilan keputusan investasi, ekonomi, manajerial dan lainnya.

Sasarannya adalah agar para pemakai, yaitu manajemen, pemegang saham, kreditor, pelanggan, konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas, dapat mengevaluasi dan menilai secara utuh terkait posisi keuangan dan kinerja bisnis, risiko-

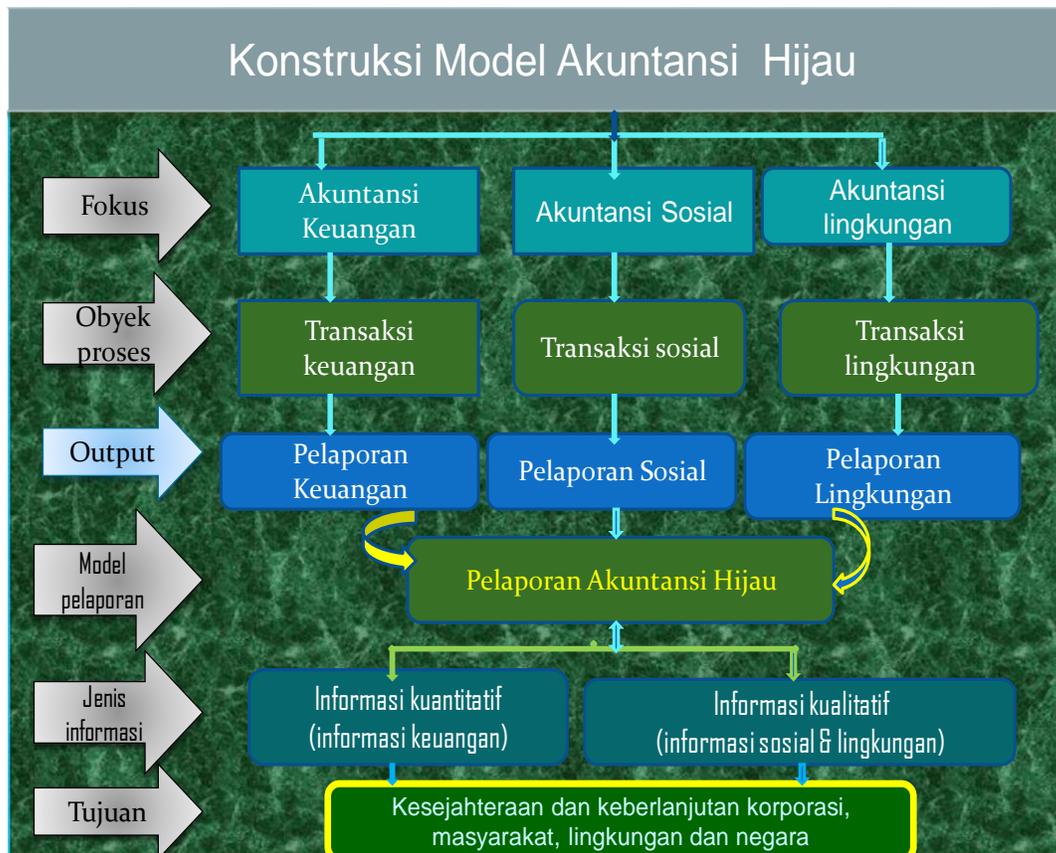
risiko korporasi (*corporate risks*), prospek pertumbuhan bisnis dan kinerja laba korporasi, serta keberlanjutan korporasi sebelum mengambil suatu keputusan ekonomi dan nonekonomi yang bersifat final. Selain itu, agar para pemangku kepentingan dapat mengetahui secara utuh informasi akuntansi tentang kualitas manajemen dalam pengelolaan bisnis yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai prasyarat utama yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan bisnis dan laba korporasi dalam jangka panjang.

Singkatnya, Akuntansi Hijau dan pelaporan informasi akuntansi hijau, selain memiliki peranan yang penting dan strategis bagi para pihak eksternal dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi, juga berperan penting bagi pihak manajemen dan karyawan dalam penilaian kinerja dan pengambilan keputusan manajerial serta pengambilan tindakan-tindakan operasional untuk mendorong korporasi semakin bertumbuh kinerja dan nilainya. Informasi akuntansi hijau juga berperan penting dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya, serta menjadi “bahasa komunikasi” yang efektif untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran manajemen dan para pihak terkait tentang pentingnya kepedulian pada tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat dan lingkungan.

(2). Model Akuntansi Hijau

Sesuai dengan definisi dan ruang lingkup Akuntansi Hijau di atas, maka penulis mengajukan konstruksi model Akuntansi Hijau seperti disajikan dalam Gambar 1 berikut. Gambar 1 memperlihatkan bahwa ruang lingkup dari Akuntansi Hijau mencakup akuntansi keuangan, akuntansi sosial dan akuntansi lingkungan. Karena itu, obyek yang diproses dalam Akuntansi Hijau mencakup semua peristiwa, obyek, dampak atau transaksi-transaksi keuangan, masyarakat dan lingkungan yang berkaitan langsung atau tidak langsung pada entitas korporasi.

Hasil dari proses akuntansi hijau untuk masing-masing obyek akuntansi tersebut disajikan dalam model Pelaporan Informasi Akuntansi Hijau. Model pelaporan ini sesungguhnya berisi tiga pelaporan informasi yaitu pelaporan informasi keuangan, pelaporan informasi sosial dan pelaporan informasi lingkungan yang telah diintegrasikan. Dalam model Pelaporan Informasi Akuntansi Hijau, terdapat dua jenis informasi akuntansi, yaitu informasi akuntansi kuantitatif yang tercermin dalam angka-angka dari elemen-elemen laporan Akuntansi Hijau, dan informasi akuntansi kualitatif yang menjelaskan aspek-aspek kualitatif dibalik angka-angka kuantitatif dari elemen-elemen Akuntansi Hijau. Dengan penyajian yang komprehensif terhadap ketiga informasi tersebut maka manajemen, pemegang saham, kreditor, pemerintah dan para pemakai lainnya akan sangat terbantu dalam mengevaluasi dan menilai posisi dan kinerja keuangan, risiko dan prospek bertumbuh serta keberlanjutan dari korporasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.



Gambar 1. Konstruksi Model Akuntansi Hijau

(3). Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi Hijau

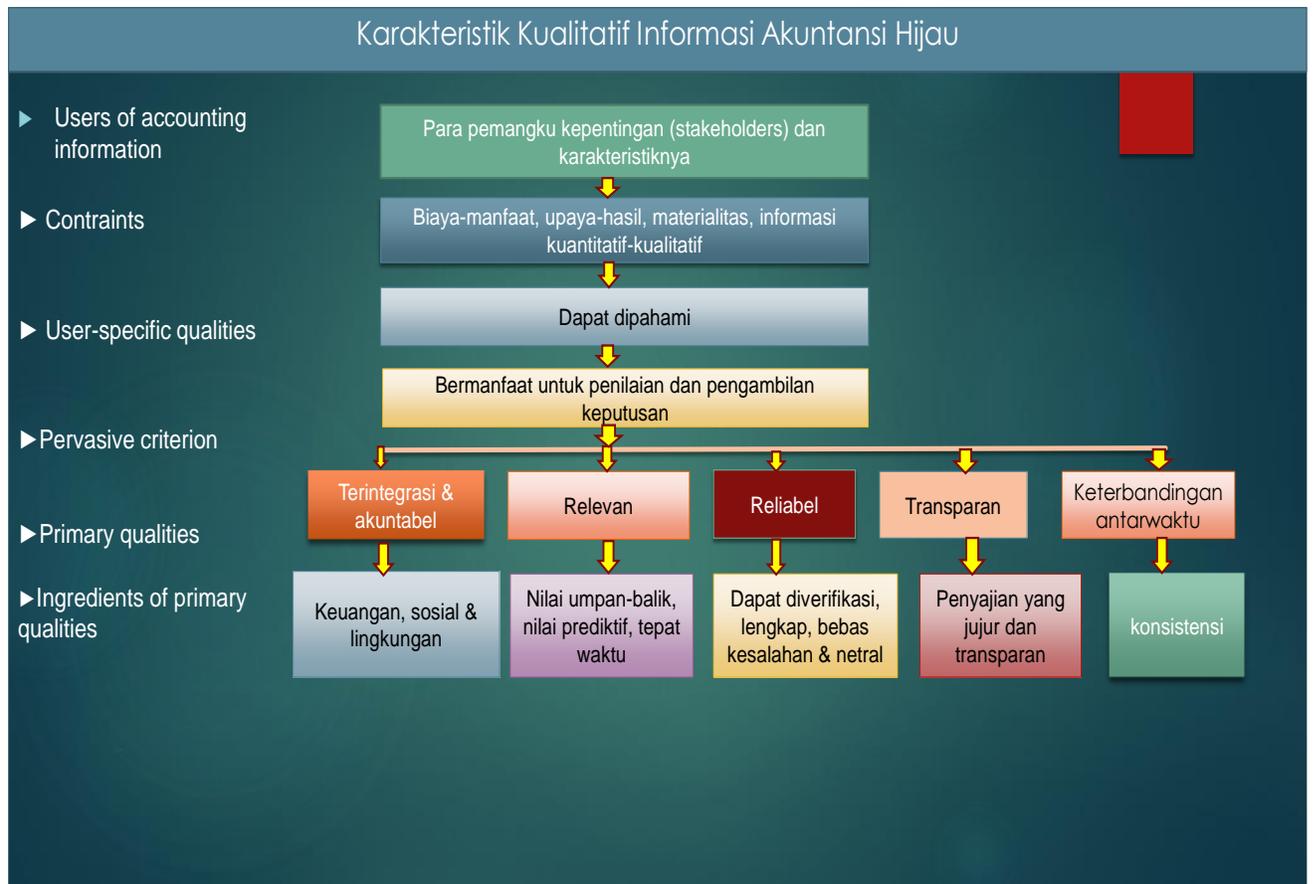
Sama seperti karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang berlaku umum selama ini (FASB dalam SFAC No.2, 1978; SAK, 2014), informasi akuntansi hijau juga harus memenuhi karakteristik kualitatif berikut ini, yaitu:

1. Para pengguna informasi akuntansi (*users of accounting information*) adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yaitu pihak manajemen, pemegang saham, investor atau pemilik, kreditor, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas korporasi.
2. Kendala (*constraint*) informasi akuntansi hijau adalah perbandingan keterukuran antara biaya dan manfaatnya (*cost-benefit*), upaya dan hasilnya (*effort-accomplishment*), materialitas informasi yang disajikan (*materiality*) dan pengungkapan informasi akuntansi kuantitatif dan kualitatif secara terintegrasi (*integrated disclosure*).

3. Syarat khusus dan pervasif yang dibutuhkan para pemakai informasi akuntansi (*users-specific qualities and pervasive criterion*) adalah informasi akuntansi yang disajikan kepada para pihak pemakai haruslah dapat dipahami (*understandability*) dan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi (*decision usefulness*).
4. Kriteria atau syarat utama dalam penyajian informasi akuntansi hijau adalah: 1) **terintegrasi dan akuntabel**, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan akuntansi hijau harus memperhitungkan, mengintegrasikan dan mempertanggungjawabkan semua informasi akuntansi keuangan, sosial dan lingkungan secara terpadu dalam satu paket pelaporan; 2) **relevan (*relevance*)**, yaitu informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan (*decision usefulness*). Karena itu, informasi akuntansi yang disajikan harus memiliki nilai umpan-balik (*feedback value*) dan nilai prediktif (*predictive value*), serta disajikan tepat waktu (*timeliness*); 3) **reliabel (*reliability*)**, yaitu informasi akuntansi yang disajikan haruslah reliabel atau handal agar dapat dipercaya (*reliability*) dan bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi. Untuk itu, informasi akuntansi yang disajikan harus dapat diverifikasi, valid, akurat dan netral; 4) **transparan (*transparency*)**, yaitu informasi akuntansi harus disajikan secara transparan dan jujur; dan 5) **keterbandingan (*comparability*)**, yaitu informasi akuntansi yang disajikan memiliki daya banding antarperiode dan disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu (*consistency*).

Selain memenuhi karakteristik kualitatif di atas, ada tiga karakteristik kualitatif khusus dari informasi akuntansi hijau yang sangat bermanfaat dalam evaluasi, penilaian pengambilan keputusan para pemakai (*primary decision-specific qualities*). **Pertama**, akuntabilitas (*accountability*) yaitu informasi akuntansi yang disajikan memperhitungkan semua aspek informasi entitas, terutama informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan entitas dan biaya-manfaat (*costs-benefits*) dari dampak (*impacts*) yang ditimbulkan. **Kedua**, terintegrasi dan komprehensif yaitu informasi akuntansi yang disajikan merupakan hasil integrasi antara informasi akuntansi keuangan dengan informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang disajikan secara komprehensif dalam satu paket pelaporan akuntansi. **Ketiga**, transparan (*transparency*) yaitu informasi akuntansi terintegrasi harus disajikan secara jujur, akuntabel dan transparan agar tidak menyesatkan para pihak dalam evaluasi, penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.

Secara lebih lengkap, konstruksi karakteristik kualitatif informasi akuntansi hijau disajikan dalam Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi hijau

(4) Elemen-Elemen Laporan Akuntansi Hijau

Secara umum, elemen-elemen Laporan Akuntansi Hijau atau Laporan Keuangan Hijau tidak jauh berbeda dengan elemen-elemen laporan keuangan dalam akuntansi keuangan konvensional yang selama ini menjadi basis dan digunakan dalam IAS-IFRS dan SAK, yaitu aset, liabilitas atau kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, biaya dan laba. Namun, ada beberapa akun krusial yang membedakan Akuntansi Hijau dengan akuntansi keuangan konvensional (konservatif), yaitu:

Pertama, dalam struktur aset entitas yang melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (TJSLP), CSR dan *green business* akan muncul akun-akun baru seperti aset sumberdaya alam, investasi sosial dan lingkungan, investasi hijau atau investasi CSR di bawah kelompok aset tetap. Secara umum, struktur aset perusahaan dalam konstruksi Akuntansi Hijau meliputi aset lancar, investasi finansial, aset tetap, aset sumberdaya alam, investasi sosial dan lingkungan, aset tidak berwujud dan aset lainnya.

Kedua, dalam struktur akun-akun liabilitas entitas yang melaksanakan TJSLP, CSR dan korporasi hijau akan muncul akun-akun baru seperti **liabilitas sosial dan**

liabilitas lingkungan yang bersifat kontinjen (*contingent social and environment liability*). Kewajiban tersebut muncul sebagai konsekuensi logis dari komitmen manajemen kepada pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan TJSLP, CSR atau bisnis hijau, atau harus bertanggung jawab atas kerugian ekonomi yang dialami masyarakat dan negara akibat kerusakan lingkungan atau pencemaran air, udara atau tanah yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Kewajiban sosial kontinjen dan kewajiban lingkungan kontinjen tersebut bisa bersifat jangka pendek atau jangka panjang tergantung pada komitmen perusahaan untuk memenuhinya.

Ketiga, dalam struktur akun-akun ekuitas dari entitas korporasi yang melaksanakan aktivitas CSR yang bersifat sukarela karena dilandasi oleh niat tulus dan nilai-nilai spiritualitas bisnis (*spiritual CSR*) dari para pemegang sahamnya, bisa muncul akun baru, yaitu akun **donasi CSR**, di bawah akun laba/rugi periode berjalan. Akun baru tersebut muncul karena manajemen atas permintaan dari pemilik atau pemegang saham memperlakukan sejumlah program CSR dan pengorbanan sumberdaya ekonomi entitas untuk melaksanakan CSR tersebut sebagai perbuatan amal atau kasih kepada sesama (masyarakat) yang miskin, lemah, difabel dan tersingkir. Karena bersifat amal-kasih maka informasi donasi CSR tersebut diminta untuk tidak diwartakan kepada para stakeholder dan masyarakat luas.

Biaya untuk melaksanakan program-program CSR yang bersifat filantropis tersebut diambil dari laba bersih setelah pajak (*net income*) atau dari laba ditahan (*retained earnings*) yang menjadi hak milik dari para pemegang saham. Karena informasinya tidak diwartakan kepada publik maka secara ekonomi, pengorbanan sumberdaya ekonomi untuk CSR tersebut dinilai tidak akan mendatangkan manfaat ekonomi dan nonekonomi di masa datang. Karena itu, dari perspektif Akuntansi Hijau, pengorbanan tersebut bisa diakui, dicatat dan dilaporkan dalam akun Donasi CSR sebagai pengurang nilai ekuitas pemilik.

Keempat, dalam struktur akun-akun biaya produksi dan biaya operasi entitas yang melaksanakan TJSLP, CSR dan *green business* akan muncul akun-akun biaya baru seperti biaya sosial dan biaya lingkungan, atau biaya-biaya penghijauan perusahaan (*greening costs*) yang bersifat periodik atau temporer. Misalnya, biaya bantuan sosial bencana alam, biaya pengolahan limbah, biaya daur ulang, biaya audit lingkungan, biaya pencemaran, biaya pengendalian polusi, biaya kerusakan lingkungan, biaya pengungkapan informasi sosial-lingkungan, dan lainnya. Secara umum, struktur biaya dalam konstruksi laporan kinerja laba-rugi dari Akuntansi Hijau meliputi biaya produksi, biaya operasional, biaya sosial dan lingkungan, dan biaya lainnya.

Secara lebih lengkap, konstruksi elemen-elemen Laporan Akuntansi Hijau atau Laporan Keuangan Hijau dapat saya sajikan dalam Gambar 3 berikut ini.

Laporan Posisi Keuangan Hijau	
<ul style="list-style-type: none"> Aset 	
Aset lancar	Rp xxx
Aset finansial	Rp xxx
Aset tetap	Rp xxx
Aset sumberdaya alam	Rp xxx
Investasi sosial & lingkungan	Rp xxx
Aset tidak berwujud	Rp xxx
Aset lain-lain	Rp <u>xxx</u> +
Total aset	Rp XXX = =====
<ul style="list-style-type: none"> Liabilitas 	
Liabilitas lancar	Rp xxx
Liabilitas sosial & lingkungan kontinjen	Rp xxx
liabilitas jangka panjang	Rp <u>xxx</u> +
Total liabilitas	Rp XXX
<ul style="list-style-type: none"> Ekuitas pemilik 	
Modal saham/disetor	Rp xxx
Laba ditahan	Rp xxx
Laba/rugi periode berjalan	Rp <u>xxx</u> +
Nilai ekuitas	Rp xxx
Donasi CSR	Rp <u>xxx</u> -
Total ekuitas	Rp <u>xxx</u> +
Total liabilitas dan ekuitas	Rp XXX =====

Laporan Kinerja Keuangan Hijau (laba/rugi)	
Pendapatan	Rp xxx
Biaya produksi	Rp <u>xxx</u> -
Laba/rugi kotor	Rp xxx
Biaya operasional:	
<ul style="list-style-type: none"> Biaya pemasaran 	Rp xxx
<ul style="list-style-type: none"> Biaya administrasi & umum 	Rp <u>xxx</u> +
Total biaya operasional	Rp <u>xxx</u> -
Laba/rugi operasional	Rp xxx
Biaya sosial & lingkungan:	
<ul style="list-style-type: none"> Biaya sosial 	Rp xxx
<ul style="list-style-type: none"> Biaya lingkungan 	Rp <u>xxx</u> +
Total biaya sosial & lingkungan	Rp <u>xxx</u> -
Laba/rugi hijau operasional	Rp xxx
Pendapatan dan beban lain-lain	<u>Rp xxx</u> -
Laba/rugi bersih sebelum pajak	Rp xxx
PPh Badan	<u>Rp xxx</u> -
Laba/rugi bersih	Rp xxx =====

Gambar 3. Konstruksi Laporan Akuntansi Hijau atau Laporan Keuangan Hijau

4. Prinsip-prinsip Akuntansi Hijau

Ada beberapa prinsip akuntansi (*accounting principles*) yang mendasari Akuntansi Hijau. Berikut disajikan enam konstruksi Prinsip Akuntansi Hijau yang dapat dipertimbangkan dalam proses praktik Akuntansi Hijau.

Pertama, prinsip sustainabilitas atau kelestarian (*sustainability principle*). Akuntansi yang mengakui dan mengukur nilai, mencatat, meringkas dan melaporkan informasi terkait obyek-obyek, dampak-dampak, peristiwa-peristiwa dan atau transaksi-transaksi keuangan, sosial dan lingkungan secara terpadu dan sistematis dalam satu paket pelaporan akuntansi untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan laba korporasi, kesejahteraan sosial dan kelestarian ekologi. Proses akuntansi yang terpadu tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan Laporan Akuntansi Hijau atau Laporan Keuangan Hijau yang terintegrasi, relevan dan reliabel untuk membantu manajemen dan para pemakai lainnya dalam penilaian dan pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi, terutama menyangkut risiko dan prospek keberlanjutan entitas korporasi.

Kedua, prinsip pengakuan aset (*asset recognition*). Pengorbanan sumberdaya ekonomi entitas korporasi (*costs*) untuk melaksanakan *green business* dan *green corporation*, melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) yang bersifat sukarela maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (TJSLP) yang bersifat wajib dapat diakui sebagai pengorbanan investasi (aset) apabila pengorbanan tersebut dinilai dapat memberikan manfaat ekonomi (*tangible benefits*) dan nonekonomi (*intangible benefits*) yang cukup pasti di masa sekarang maupun di masa datang. Apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka pengorbanan tersebut harus segera diperlakukan sebagai beban periodik dalam laporan kinerja laba-rugi entitas.

Ketiga, prinsip pengakuan kewajiban (*liability recognition*). Suatu kewajiban lingkungan (*environment liability*) atau kewajiban sosial (*social liability*) harus segera diakui ketika entitas korporasi diwajibkan oleh pemerintah atau pihak lain untuk menanggung kerugian atau mengganti biaya kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat yang diakibatkan oleh aktivitas operasi korporasi. Komitmen korporasi untuk bertanggung jawab mengatasi pencemaran dan polusi, memulihkan kerusakan lingkungan, ikut menghijaukan dan melestarikan alam, serta ikut serta membantu pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar melalui program-program CSR juga dapat diakui sebagai kewajiban sosial dan lingkungan.

Keempat, prinsip *matching* dalam pengukuran nilai *costs-benefits* dan *efforts-accomplishments* (*measurement principle*) dari tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengukuran nilai dan perbandingan hasil terhadap *costs-benefits* dan upaya-pencapaian

(*efforts-accomplishments*) tanggung jawab sosial dan lingkungan korporasi tidak hanya diberlakukan dalam periode akuntansi yang sama, tapi juga untuk periode-periode yang berbeda di waktu-waktu selanjutnya apabila pengorbanan sumberdaya ekonomi (*costs*) dan daya-upaya (*efforts*) tersebut memiliki potensi manfaat ekonomi dan nonekonomi yang cukup pasti di masa datang. Hakikat dari prinsip pengukuran nilai tersebut juga menjadi basis dalam prinsip pengakuan biaya (*expense recognition*) dan pengakuan pendapatan (*revenue recognition*).

Kelima, prinsip proses akuntansi terintegrasi (*integrated accounting process principle*). Proses akuntansi, yaitu pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan dan pelaporan informasi akuntansi harus memadukan obyek-obyek, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa keuangan/ekonomi, sosial dan lingkungan secara sistematis dan terintegrasi dalam satu paket pelaporan sehingga para pemakai dapat memperoleh informasi akuntansi yang lengkap, utuh, relevan dan handal serta berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.

Keenam, prinsip pelaporan dan pengungkapan informasi akuntansi yang terintegrasi (*integrated reporting principle*). Dalam pelaporan dan pengungkapan informasi akuntansi, entitas korporasi harus melaporkan dan mengungkapkan semua informasi akuntansi keuangan, sosial dan lingkungan, baik yang kuantitatif maupun yang bersifat kuantitatif, secara terpadu agar para pemakai internal dan eksternal dapat memperoleh informasi yang lengkap, relevan dan handal tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan, risiko dan prospek, serta komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan dan keberlanjutan suatu entitas sebelum melakukan evaluasi, penilaian dan mengambil suatu keputusan. Peran pengungkapan informasi akuntansi kualitatif tersebut adalah untuk melengkapi dan menjelaskan hal-hal penting yang berkaitan dengan item-item informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang bersifat kuantitatif. Pengungkapan informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang bersifat kualitatif tersebut dapat dilakukan melalui media catatan atas laporan akuntansi hijau (prinsip pengungkapan penuh atau *full disclosure*).

Tujuan utama dari proses akuntansi yang terintegrasi tersebut adalah untuk mendukung keberlanjutan atau kelestarian lingkungan (*planet*), masyarakat (*people*) dan pertumbuhan laba (*profit*) sebagai pilar dasar dari entitas korporasi. Dengan menyajikan informasi akuntansi yang terintegrasi maka para pihak akan menggunakannya untuk melakukan penilaian dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan ekonomi dan nonekonomi yang lebih ramah masyarakat dan lingkungan.

Referensi

- Beal, B.D. 2014. *Corporate Social Responsibility: Definition, Core Issues and Recent Development*. SAGE Publications, Ltd. California
- Bebbington, J., J. Unerman, & B.O'dwyer (editor). 2014. *Sustainability Accounting and Accountability*. Second Edition. Roudledge Taylor & Francis Group. London and New York
- Benn, S & D. Bolton. 2011. *Key Concepts in Corporate Social Responsibility*. SAGE Publication Ltd. London
- Cannon. T. 1995. *Corporate Responsibility (Tanggung Jawab Perusahaan)*. Pitman Publishing. London. Alih bahasa FG Najooan. Penerbit PT Elex Media Computindo. Jakarta
- Darwin, A. 2017. Sustainability Reporting Paractice in Indonesia. *Working paper* (ppt). Disajikan dalam Seminar Sustaibility Reporting, Universitas Negeri Surakarta, 4 November 2017
- Deegan, C., 2004. *Financial Accounting Theory*. Third Edition. McGraw-Hill Companies. Australia.
- Deegan, C. 2013. The Accountant will have a central role in saving the planet... Really A reflection on 'green accounting and green eyeshades twenty years later'. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 24.pp 448-458
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Tripple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone, Oxford
- Elkington, J. 2001. *The Chrysalis Economy: How Citizen CEOs and Corporations can Fuse Values and Value Creation*. Capstone Publishing Ltd. United Kingdom.
- Gallhofer, S. & J. Haslam. 1997. The Direction of Green Accounting Policy: Critical Reflections. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*. Vol. 10.No.2. pp 148-174
- Gore, A. 2013. *The Future: Six Drivers of Global Change*. Random House. New York
- Gray, R. & R. Laughlin. 2012. It was 20 Years ago today Sgt Pepper, *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*, Green Accounting and Blue Meanies. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*. Vol.25. No.2. pp 228-255
- Gray, R. dan J. Bebbington. 2001. *Accounting for the Environment*. Second Edition. Sage Publishing Ltd. London

- Greenham, T. 2010. Green Accounting: A Conceptual Framework. *International Journal of Green Economics*. Vol.4, Issue4, hlm 333-345
- Lako, A. 2011a. *Rekonstruksi Paradigma Bisnis dan Akuntansi: Menuju Akuntansi Berkelanjutan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, 28 Mei 2011.
- Lako, 2011b. *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Lako, A. 2014. Menghijaukan Akuntansi dan Akuntan. *CPA Indonesia*. edisi 7 Juni 2014, hlm 52-54
- Lako, A. 2015a. *Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Lako, A. 2015b. *Berkah CSR Bukan Fiksi*. La Tofi Publishing Enterprises. Edisi Pertama
- Lako, A. 2015c. CSR dan Reformasi Pengakuan Akuntansi. *CPA Indonesia*. Edisi 5. hlm 52-53
- Lako, A. 2015d. CSR Investasi Strategis. *Investor Daily*. 18 Mei 2015
- Lako, A. 2016a. Transformasi Menuju Akuntansi Hijau. Desain Konsep dan Praktik. Paper disajikan dalam *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke-19 Lampung* untuk sesi Corporate Governance, CSR & Green Accounting IAI-KAPd pada 26 Agustus 2016
- Lako, A. 2016b. Transformasi Menuju Akuntansi Hijau. *CPA Indonesia*. Edisi 7. hlm 52-54.
- Lako, A. 2016c. Konstruksi Teori Akuntansi Hijau dan Strategi Pendidikan Akuntansi. Paper disajikan dalam *Seminar Nasional dan Kolaborasi Riset IAI-KAPd sesi Corporate Governance & CSR*. Universitas Negeri Surakarta, 12-13 November 2016
- Lako, A. 2016d. Meminimalisir Sisi Gelap CSR. *Tabloid KONTAN*. Edisi 18-25 April 2016
- Lako, A. 2017. Menuju Akuntansi Hijau: Isu, Tantangan dan Strategi Pendidikan & Riset Akuntansi. Paper disajikan dalam *Seminar Nasional "Improving Green Accounting in Developing Business Sustainability"* yang diselenggarakan Jurnal MODUS Fakultas Ekonomi Univeritas Atma Jaya Yogyakarta, 14 Oktober 2017
- Lako, A. 2018. *Akuntansi Hijau: Isu, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Salemba Empat. Edisi Pertama. Jakarta
- Lamberton, G. 2005. Sustainability Accounting - A Brief History and Conceptual Framework. *Accounting Forum*. No. 29. hlm 7-26

- Lawrence, A.T dan J. Weber. 2008. *Business and Society: Stakeholders, Ethics, Public Policy*. Twelfth Edition. McGraw-Hill Irwin. Boston
- Makower, J. 1994. *The E-Factor: The Bottom-Line Approach to Environmentally Responsible Business*. Tilden Press Inc. New York
- Maunder, K.T. & R.L. Burritt. 1991. Accounting and Ecological Crisis. *Accounting, Auditing, & Accountability Journal*. Vol. 4. No.3.pp 9-26
- Patelis, C.N, J. Keenan & V. Pryce (editor). 2011. *Green Business, Green Values, and Sustainability*. Roudledge. New York
- Pemerintah RI. *Undang-Undang Republik Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Penerbit Gradien Mediatama, Yogyakarta
- Pemerintah RI. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Steiner, J.F. dan G.A. Steiner. 2009. *Business, Government, and Society: A Managerial Perspective, Text and Cases*. Twelfth Edition. McGraw-Hill Irwin. Boston
- Thornton, D.B., 2013. Green Accounting and Green Eyeshades Twenty Years Later. *Critical Perspective on Accounting*. Vol.24. hlm 438-442
- Utama, S. 2015. Bagaimana Mendorong Praktek Akuntansi dan Pelaporan Hijau? Makalah disajikan dalam *Seminar & Bedah Buku "Green Economy: Menghijaukan Ekonomi, Bisnis & Akuntansi"*. Unika Soegijapranata, 1 Juni 2015
- Wu, J. dan C. Overton. 2002. Asia Ecology: Pressing Problems and Reserch Agenda. *Bulletin of Ecological Society of America*. 83 (3): 189-194.